

## Dinamika Hubungan Politik dan Pendidikan Agama di Kampus: antara Keseimbangan dan Konflik

Ali Nurdin

Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang, Banten

Eneng Humaeroh

Universitas Mathla'ul Anwar, Pandeglang, Banten

Korespondensi penulis: [aldin.aliansi@gmail.com](mailto:aldin.aliansi@gmail.com)

**Abstract:** *Politics and religion have a close relationship and are important subjects in social and political studies. This research presents an analysis of the dynamics of the relationship between religious education on campus and politics in the context of contemporary dynamics. This research focuses on the role of religion in the formation of public policy, political identity, and the dynamics of social conflict. This research study is a discourse or literature search, to find out the relationship between these two problems. This research pays attention to phenomena and changes in power dynamics, transformation of religious identity, and ideological conflicts involving religion as a central aspect. This article also considers the implications of the interaction between religion and politics for democracy. The research method used is a qualitative approach. The data sources used are a combination of educational and religious political perspectives. Literature is used to explain how religion is often a source of inspiration for political movements, both in practical contexts and as a basis for thought. The analysis of this research aims to encourage a broader and deeper dialogue about how society, especially educational institutions, can manage and understand the role of religion in a democratic and inclusive political space.*

**Keywords:** *Politics, Religious Education, Contemporary Dynamics*

**Abstrak:** Politik dan agama memiliki hubungan yang erat dan menjadi subjek penting dalam kajian sosial dan politik. Penelitian ini menyajikan analisis tentang dinamika hubungan antara pendidikan agama di lingkungan kampus dan politik dalam konteks dinamika kontemporer. Penelitian ini fokus pada peran agama dalam pembentukan kebijakan publik, identitas politik, dan dinamika konflik sosial. Ajian penelitian ini merupakan diskursus atau penesuran kepustakaan, untuk mendapatkan relasi kedua masalah tersebut. Penelitian ini memperhatikan fenomena dan perubahan dinamika kekuasaan, transformasi identitas agama, dan konflik ideologis yang melibatkan agama sebagai aspek sentral. Artikel ini juga mempertimbangkan implikasi dari interaksi antara agama dan politik terhadap demokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber-sumber data yang digunakan adalah gabungan perspektif pendidikan dan politik keagamaan. Literatur digunakan untuk menjelaskan bagaimana agama sering kali menjadi sumber inspirasi bagi gerakan politik, baik dalam konteks praktis maupun basis pemikiran. Analisis dari penelitian ini bertujuan untuk mendorong dialog yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana masyarakat, terutama lembaga pendidikan dapat mengelola dan memahami peran agama dalam ruang politik yang demokratis dan inklusif.

**Kata kunci:** Politik, Pendidikan Agama, Dinamika Kontemporer

### LATAR BELAKANG

Hubungan antara politik dan pendidikan agama telah lama menjadi subjek yang kompleks dan kontroversial. Keduanya memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk budaya, tidak hanya dilingkungan kampus tapi juga ditengah-tengah masyarakat. Kedua subyek ini saling berinteraksi, baik secara positif maupun negatif. Dinamika hubungan ini terus berkembang seiring waktu, mencerminkan perubahan dalam nilai, kepercayaan, dan kekuasaan.

Lingkungan kampus tidak bersih dari aktivitas politik bahkan kegiatan keagamaan di kampus sering menjadi salah satu kekuatan utama dalam membentuk pandangan dan nilai-nilai

politik. Kampus menjadi bagian dari otoritas keagamaan untuk memperkuat legitimasi politik. Masyarakat memandang hal ini menjadi bagian penting dari kekuatan politik bahkan sebagai basis kemenangan dalam suatu konstestasi politik.

Penelitian ini mencoba mengupas bahwa politik dalam agama, sebaliknya, politik juga dapat memengaruhi praktik dan doktrin keagamaan. Pemerintah dapat mencoba untuk mengontrol atau memanipulasi agama untuk mencapai tujuan politik mereka. Sejarah mencatat berbagai contoh di mana agama digunakan sebagai alat untuk mengendalikan massa atau mengamankan kekuasaan politik.

## **KAJIAN TEORITIS**

Ilmu politik menurut Roger F. Soltou, yang dikutip oleh Budihardjo, adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut serta hubungan antara negara dengan warganya dan dengan negara lainnya. J. Barents mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mengamati kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat (Budihardjo, 2001).<sup>1</sup>

Sedangkan pendidikan islam menurut Ahmad D Marimba, adalah bimbingan jasmani maupun rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam (Marimba, 2009).<sup>2</sup> Senada dengan Marimba, Achmadi mendefinisikan pendidikan Islam adalah segala usaha untuk memelihara dan mengembangkan fitrah manusia serta sumber daya nsan yang berada pada subjek didik menuju terbentuknya manusia seutuhnya (insan kamil) sesuai dengan norma Islam atau dengan istilah lain yaitu terbentuknya kepribadian muslim (Achmadi, 2002).<sup>3</sup>

Hubungan antara politik dan agama sering kali menimbulkan konflik. Perbedaan dalam keyakinan agama dapat menyebabkan ketegangan politik yang serius. Campur tangan politik dalam urusan keagamaan dapat mengancam kebebasan beragama dan hak asasi manusia. konflik itu semakin menguat ketika agama dijadikan basis kekuatan politik, agama menjadi obyek dari politik, bahkan pendidikan agama diperkuat untuk legitimasi politik. Hal ini mendorong kelompok-kelompok kampus untuk memperkuat kajian-kajian agama yang membahas politik.

Konflik antara politik dan agama tidak seutuhnya ada, untuk menekan konflik yang terjadi dilakukan upaya untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara keduanya. Negara-negara demokratis sering mengadopsi prinsip pemisahan antara agama dan negara, yang

---

<sup>1</sup> Budihardjo, M. (2001). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, hal 201

<sup>2</sup> Marimba, A. D. (2009). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Al-Ma'arif. Hal 29

<sup>3</sup> Achmadi. (2002). *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya media. Hal 97

bertujuan untuk melindungi kebebasan beragama sambil mencegah dominasi agama dalam urusan politik, atau sebaliknya dominasi politik terhadap agama.

Dalam ranah transformasi kontemporer di era globalisasi dan pluralisme saat ini, dinamika hubungan politik dan agama terus berubah. Perkembangan teknologi dan komunikasi telah membuka pintu bagi ekspresi keagamaan yang beragam, sementara isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan semakin memengaruhi diskursus politik dan agama. Maka dalam rangka mengelola dinamika hubungan politik dan agama, penting untuk mempromosikan dialog terbuka dan saling pengertian antara kedua sisi. Meskipun perbedaan pendapat akan selalu ada, kerjasama antara pemimpin politik dan otoritas keagamaan dapat membantu membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan bagi semua warganya.

Eratnya hubungan antara politik dan pendidikan dalam sejarah Islam, menimbulkan analisis terhadap kasus madrasah Nizamiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Sirozi dari Rasyid, bahwa politik dalam Islam sama-sama memiliki urgensi yang tinggi dengan pendidikan. (Sirozi, M. 2010).<sup>4</sup> Tanpa adanya otoritas politik, syari'at Islam sulit, bahkan mustahil bisa ditegakkan. Kekuasaan sebagai sarana dalam mempertahankan syari'at Islam. Sedangkan pendidikan bergerak sebagai upaya penyadaran terhadap umat dalam menjalankan syari'at. Tanpa pendidikan umat tidak akan faham terhadap syari'ah. Jika politik (kekuasaan) berfungsi sebagai pengayom dari atas, maka pendidikan akan selalu berbenah diri melalui arus bawah.

Hubungan keduanya penting dan untuk mengelola hubungan tersebut maka diperlukan dialog antar politik dan agama. Dengan menyediakan pendidikan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai kerukunan antarumat beragama, generasi muda dapat dilengkapi dengan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan antara politik dan agama. Kompleksitas politik dan agama akan mendorong manipulasi politik. Masyarakat harus mewaspadaai upaya politik yang menggunakan agama sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan meningkatkan kesadaran akan potensi manipulasi politik ini, masyarakat dapat lebih waspada dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kebebasan beragama dan nilai-nilai demokratis.

David Abernethy dan Trevor Coombe berpandangan bahwa pendidikan dan politik terkait tanpa dapat dipisahkan. Lebih lanjut menurut mereka hubungan timbal balik antara pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok (*groups attitudes*), masalah pengangguran (*unemployment*), dan peranan politik kaum

---

<sup>4</sup> Sirozi, M. (2010). *Politik Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal 103

ceudekia (the political role of the intelligentsia). (David Abernethy dan Trevor Coombe).<sup>5</sup> sedangkan Sirozi menyebutkan bahwa kaitan politik dengan pendidikan sangat bergantung pada kondisi masyarakatnya, sehingga dalam suatu masyarakat tertentu hubungan tersebut boleh saja sangat kuat dan riil, dan dalam masyarakat yang lain hubungan tersebut lemah dan tidak nyata. (M. Siroz, 2010).<sup>6</sup>

Pandangan lain diungkapkan Thomas H. Eliot bahwa bahwa semua sistem sekolah telah dirusak oleh berbagai aspek politik yang masuk secara paksa, khususnya penggunaan patronase dalam pengangkatan (staf) dan penentuan kontrak-kontrak kerja. (School Politic, 1957).<sup>7</sup> pemikirang yang sejalan dengan Thomas H. Eliot adalah Roesco Martin, yang memandang bahwa infiltrasi politik dalam dunia pendidikan adalah sesuatu yang berbahaya. Lebih lanjut Martin berpandangan bahwa pendidikan publik harus dipisahkan (dari politik) dan mendapat perlakuan khusus.(Sirozi, M. 2010).<sup>8</sup>

Fakta yang dapat kita temukan bahwa hubungan lembaga politik dan keagamaan dapat menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang inklusif dan beradab. Melalui dialog terus-menerus dan upaya bersama, kedua belah pihak dapat bekerja untuk menciptakan kebijakan yang mempromosikan keadilan sosial, kesetaraan, dan perdamaian yang berkelanjutan. Dengan mengakui kompleksitas dinamika hubungan politik dan agama serta mengambil langkah-langkah konkret untuk mempromosikan dialog, pemahaman saling, dan keadilan, masyarakat dapat membangun fondasi yang kuat untuk harmoni antarumat beragama dan kemajuan bersama.

*Aspek-aspek yang terpengaruh hubungan Politik dan agama diantaranya adalah :*

1. Legitimasi Kekuasaan: Agama sering digunakan sebagai sumber legitimasi bagi pemerintah dan pemimpin politik. Dalam banyak masyarakat, kekuasaan politik dikaitkan dengan otoritas agama atau dipertahankan dengan alasan agama untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
2. Pembentukan Nilai dan Etika: Agama sering memainkan peran penting dalam pembentukan nilai-nilai dan etika yang membentuk dasar kebijakan politik. Prinsip-prinsip moral dan keadilan yang diambil dari ajaran agama dapat memengaruhi pembuatan keputusan politik dan pembentukan hukum.
3. Konflik dan Tantangan: Di sisi lain, perbedaan keyakinan agama juga dapat menyebabkan konflik politik yang serius. Perselisihan terkait agama, doktrin, atau praktik keagamaan

---

<sup>5</sup>David Abernethy dan Trevor Coombe, "Education and Politics in Developing Countries", *Harvard Educational Review*, Vol. 35, Nomor 3, 287-289

<sup>6</sup>M. Sirozi, *Politik Pendidikan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik*, hal 18

<sup>7</sup>School Politics, dalam *American Political Science Review*, Vol. 53, No. 4, Desember 1957, h: 1032-1051.

<sup>8</sup> Op. Cit h. 21-23.

sering menjadi pemicu konflik politik yang berkepanjangan, bahkan memicu perang saudara atau tindakan terorisme.

4. Pemisahan atau Integrasi: Di berbagai negara, terdapat pendekatan yang berbeda terkait hubungan antara politik dan agama. Beberapa negara menganut prinsip pemisahan agama dan negara, sementara yang lain memiliki sistem di mana agama secara aktif terlibat dalam urusan politik.
5. Transformasi Kontemporer: Di era globalisasi dan pluralisme, hubungan politik dan agama terus mengalami transformasi. Isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan semakin memengaruhi diskursus politik dan agama, menciptakan tuntutan baru bagi kedua lembaga. Dalam banyak masyarakat, politik dan agama merupakan dua kekuatan dominan yang saling berkaitan dan berinteraksi dalam membentuk tatanan sosial dan budaya. Memahami kaitan antara keduanya adalah langkah penting dalam memahami dinamika kompleks dari masyarakat dan politik kontemporer.

Agama maupun politik merupakan lembaga masyarakat yang menghasilkan nilai-nilai tertentu. Nilai-nilai politik ini tidak dapat dipisahkan dari ideologi yang menjadi sumber nilai dan cita-cita yang diaktualisasikan oleh lembaga-lembaga politik (partai, ormas). Oleh karena itu membicarakan hubungan antara agama dan politik sebagai sistem sosial selalu berkaitan dengan ideologi dan kontrol politik terhadap agama.

Dinamika hubungan antara agama dan negara berlangsung dalam konteks instrumentalisasi yang kerap kali ditemplei oleh muatan potensi integratif maupun disintegratif. Dengan konkretisasi, interpretasi dan formalisasi agama dalam kehidupan yang nyata, manusia memiliki legitimasi untuk menjadikannya sebagai instrumen kekuasaan. Keduanya saling mempengaruhi dan membutuhkan untuk kemaslahatan umat.

Negara harus di beri keleluasaan untuk mengatur aspek ideologis, karena bagaimanapun juga bagi bangsa Indonesia yang memiliki bermacam-macam agama, agama akan lebih berfungsi positif bila dilepaskan dari permasalahan ideologis. Di lain pihak, independensi agama dalam hal yang menyangkut ibadah dan ajaran keimanan haruslah dihormati oleh negara. Pengaturannya selama ini masih dapat dititipkan pada sejumlah perangkat formal seperti undang-undang. Namun sisi lainnya terjadi penguasaan politik terhadap agama yang menciptakan ruang kekuatan yang tidak seimbang.

1. Kontrol dan Manipulasi: Pemerintah atau kelompok politik tertentu dapat mencoba untuk mengontrol atau memanipulasi agama untuk mencapai tujuan politik mereka. Ini bisa mencakup penggunaan narasi agama untuk memperkuat legitimasi politik atau menekan kelompok agama yang dianggap mengancam kekuasaan.

2. **Regulasi dan Pembatasan:** Pemerintah dapat menerapkan regulasi atau pembatasan terhadap praktik keagamaan tertentu, baik untuk alasan politik atau keamanan nasional. Contohnya termasuk pembatasan terhadap ibadah di tempat-tempat umum atau larangan terhadap simbol-simbol keagamaan dalam ruang publik.
3. **Pembiayaan dan Subsidi:** Pemerintah dapat memberikan dukungan finansial atau subsidi kepada institusi keagamaan tertentu sebagai bagian dari strategi politik mereka. Hal ini dapat digunakan sebagai cara untuk memperkuat hubungan dengan komunitas agama atau untuk mempromosikan agenda politik tertentu.
4. **Mobilisasi Massa:** Agama sering digunakan sebagai alat untuk mobilisasi massa dalam konteks politik. Pemimpin agama atau kelompok keagamaan dapat memobilisasi pengikut mereka untuk mendukung kandidat atau partai politik tertentu yang dianggap mendukung nilai-nilai keagamaan mereka.
5. **Pengaruh dalam Pembuatan Kebijakan:** Agama dapat memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembuatan kebijakan politik. Para pemimpin agama sering terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik atau memiliki akses langsung ke para pemimpin politik untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan mereka.
6. **Penentuan Agenda:** Nilai-nilai dan isu-isu keagamaan sering menjadi bagian dari agenda politik, terutama dalam konteks debat publik atau pemilihan umum. Para pemimpin agama atau kelompok keagamaan dapat membantu menentukan isu-isu yang diberikan perhatian dalam politik, seperti hak asasi manusia, moralitas, atau isu-isu sosial.

Kekuatan politik dan agama sering saling memengaruhi dan bergantung satu sama lain dalam berbagai konteks sosial dan politik. Interaksi antara kedua kekuatan ini dapat menciptakan dinamika yang kompleks dan bervariasi tergantung pada konteksnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang dilakukan untuk mengungkap permasalahan terhadap suatu fenomena. Metode penelitian ini mengungkapkan substansi penelitian dalam bentuk narasi atau deskripsi penelitian mengenai fenomena yang diteliti. Sumber-sumber data yang digunakan adalah pandangan-pandangan, catatan lapangan, jurnal penelitian yang memiliki korelasi dan lainnya.

Metode penelitian ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang memandu peneliti melakukan penyelidikan secara ilmiah dan terstruktur. Metode penelitian yang dapat dipilih dalam penelitian ini tergantung pada jenis penelitian yang dilakukan, tujuan penelitian, sumber data yang tersedia, dan pertimbangan lain yang relevan. Pendekatan kualitatif menekankan

pada pemahaman mendalam, interpretasi, dan pemaknaan dari perspektif subjek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam metode ini antara lain observasi dan analisis dokumen.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Agama sering dijadikan alat berpolitik karena memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk pandangan dunia, nilai-nilai, dan identitas individu serta kelompok. Alasan yang kuat mengapa agama sering digunakan sebagai alat politik, meliputi; *Pertama*) Legitimasi Kekuasaan: yakni agama sering digunakan untuk memberikan legitimasi atas kekuasaan politik. Pemimpin atau pemerintah yang mengaku berdiri atas dasar nilai-nilai agama dapat memperoleh dukungan dan kredibilitas tambahan dari masyarakat yang beragama sama. *Kedua*) Mobilisasi Massa: Agama memiliki potensi untuk memobilisasi massa dalam konteks politik. Pemimpin agama atau kelompok keagamaan dapat memanfaatkan basis pengikut mereka untuk mendukung kandidat atau agenda politik tertentu. *Ketiga*) Pengaruh dalam Pembuatan Kebijakan: Nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik. Pemimpin agama atau kelompok keagamaan sering terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik atau memiliki akses langsung ke para pemimpin politik untuk mempengaruhi kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai agama mereka. *Keempat*) Identitas Politik: Agama dapat menjadi bagian integral dari identitas politik seseorang atau kelompok. Dalam masyarakat di mana agama memainkan peran dominan dalam kehidupan sehari-hari, identitas keagamaan sering kali menjadi faktor penentu dalam pilihan politik seseorang. *Kelima*) Perebutan Kekuasaan: Dalam konteks konflik politik atau perebutan kekuasaan, agama sering digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dukungan atau untuk meneguhkan posisi politik tertentu. Ini bisa mencakup penyebaran narasi agama untuk memperkuat atau mengkritik pemerintah yang ada.

Kampus atau lembaga pendidikan tidak dapat lepas dari upaya-upaya mobilisasi alat politik yang dapat memicu konflik atau polarisasi dalam masyarakat, terutama jika digunakan dengan cara yang tidak bertanggung jawab atau mengabaikan prinsip-prinsip toleransi dan pluralisme. Politik dalam pendidikan sama-sama memiliki urgensi. Hubungan yang erat cenderung mutualisme, bahwa pendidikan memerlukan dukungan politik, misalnya menetapkan kebijakan yang terdapat didalamnya. Dan politik memerlukan dukungan dari bidang pendidikan sebagai salah satu basis masa atau dukungan untuk legitimasi kekuasaan.

Hubungan kedua entitas ini dapat terjadi model integrasi, yakni agama secara terbuka diintegrasikan ke dalam struktur politik negara. Negara berdasarkan agama, seperti negara Islam atau negara berdasarkan agama lainnya, mengadopsi hukum dan kebijakan yang mencerminkan ajaran agama tersebut. Pemimpin agama atau lembaga keagamaan memiliki

peran penting dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Dukungan agama identik dengan pengikut yang kuat dan loyal. Dengan mengidentifikasi diri mereka dengan agama tertentu, politisi dapat memobilisasi dukungan massa dari komunitas agama yang besar. Dukungan ini dapat menjadi kekuatan politik yang signifikan, terutama dalam pemilihan umum atau perjuangan politik lainnya.

Pendidikan agama di kampus kadang dilabelisasi dan dilegitimasi sehingga hubungan politik dan agama dapat memberikan legitimasi tambahan kepada politisi. Di banyak masyarakat, otoritas agama dianggap memiliki otoritas moral yang kuat, dan politisi yang didukung oleh otoritas agama dapat dianggap lebih sah atau lebih berwibawa oleh masyarakat.

Dukungan tersebut dapat dijadikan identitas politik, atau agama sering kali merupakan bagian integral dari identitas politik seseorang atau kelompok. Dalam masyarakat di mana agama memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Politisi dapat menggunakan identitas keagamaan mereka untuk membangun dukungan politik. Hal ini didukung dengan dorongan pemilih yang tertarik pada Isu-isu keagamaan. Isu-isu keagamaan sering kali penting bagi sebagian besar pemilih. Meskipun politisasi agama dapat memberikan keuntungan politik bagi politisi, penting untuk diingat bahwa penggunaan agama sebagai alat politik juga dapat memicu konflik atau polarisasi dalam masyarakat. Politisi harus bertanggung jawab dalam menggunakan agama dalam konteks politik dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dari tindakan mereka.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hubungan politik dan pendidikan agama sangat erat. Keduanya memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk budaya, tradisi politik bahkan basis kekuatan politik atau legitimasi politik. Pendidikan agama adalah kekuatan politik, hubungan yang dinamis tersebut secara tidak langsung dan disepakati oleh kedua belah pihak atau subyek yang saling berinteraksi. Dinamika hubungan berkembang sesuai dengan kepentingan yang saling memberi manfaat yang positif. Hubungan keduanya mencerminkan perubahan nilai, kepercayaan, dan kekuasaan.

Kampus identik dengan kekuatan dan aktivitas politik dan tidak hanya menjadi tempat untuk aktivitas belajar dan mengajar, namun tempat aktivitas politik bahkan kegiatan keagamaan menjadi legitimasi warna politik tertentu. Kampus sering menjadi salah satu kekuatan utama dalam membentuk pandangan dan nilai-nilai politik, meskipun tidak ada legitimasi khusus. Kampus menjadi bagian dari otoritas keagamaan untuk memperkuat legitimasi politik.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Pada bagian akhir dari penulisan penelitian ini, saya ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas kolaborasi luar biasa dalam menyelesaikan riset ini. Dengan kerja keras dan dedikasi tim tantangan dan rintangan dapat dilewati lebih mudah. Terima kasih atas dedikasi dan kerja keras serta kontribusi yang diberikan dalam penelitian ini.

Kami berharap hasil riset ini dapat memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan ilmiah dan kebermanfaatannya penelitian bagi khalayak atau masyarakat pada umumnya. Dan kami berharap terdapat kelanjutan penelitian yang baik di masa mendatang dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan memberikan dampak positif yang lebih besar lagi dalam dunia riset ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Achmadi. (2002). *Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya media.
- Budihardjo, M. (2001). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- David Abernethy dan Trevor Coombe, “*Education and Politics in Developing Countries*”, *Harvard Educational Review*, Vol. 35, Nomor 3
- Marimba, A. D. (2009). *Pengantar Filsafat Pendidikan*. Bandung: Al-Ma’arif.
- M. Sirozi, *Politik Pendidikan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Politik Pendidikan Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo,
- School Politics, dalam *American Political Science Review*, Vol. 53, No. 4, Desember 1957